



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun standar belanja sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disebut PPK-OPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Standar Belanja merupakan acuan tertinggi belanja kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Standar Belanja digunakan sebagai Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD).

Pasal 4

Terhadap usulan biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetapi diperlukan oleh OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus melalui Kajian dan Analisa dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang perhitungannya dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan, akuntabel dan mencantumkan besaran biaya yang diberikan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala sesuatu yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengacu pada Standar Belanja dimaksud.

Pasal 6

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Oktober 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 20

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 41
TAHUN : 2017

STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2018

I. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Kegiatan

a. Pengelola Anggaran/Barang pada OPD

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengguna Anggaran	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 700.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 800.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 900.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 1.150.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 1.300.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.500.000

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 400.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 700.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 800.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 900.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan-OPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 400.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 550.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 600.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 650.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 700.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

4. Pejabat Pembuat Komitmen mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 750.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 1.250.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 1.500.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 1.750.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 2.000.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 2.250.000

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah seluruh pagu anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 350.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 450.000
4	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 550.000
5	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 650.000

6. Tenaga Teknis Lapangan Pekerjaan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Tenaga Teknis Lapangan Pekerjaan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
4	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran

No	Bendahara Pengeluaran	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 500.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 600.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 700.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 900.000
8	Bendahara Pengeluaran SKPKD diatas 100 Milyar	O/B	Rp. 1.500.000

b. Bendahara Penerimaan

No	Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 450.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 500.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 700.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

8. Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 300.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 400.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 450.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000

b. Bendahara Penerimaan Pembantu

No	Bendahara Penerimaan Pembantu	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
5	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

9. Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembantu Bendahara Pengeluaran

No	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 350.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

b. Pembantu Bendahara Penerimaan

No	Pembantu Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya
1	Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	O/B	Rp. 250.000
4	Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	O/B	Rp. 300.000
5	Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 350.000
6	Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 400.000
7	Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000

10. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, serta Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna pada OPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

No	Pengurus Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Daerah	OB	Rp. 750.000
2	Pengurus Barang Pengguna OPD selain sebagaimana tersebut pada angka 1	OB	Rp. 500.000
3	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Daerah	OB	Rp. 500.000
4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna OPD selain sebagaimana tersebut pada angka 3	OB	Rp. 300.000

b. Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna

No	Penyimpan Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Pembantu di RSUD	OB	Rp. 750.000
2	Pengurus Barang Pembantu di UPT Instalasi Farmasi Dinkes	OB	Rp. 500.000
3	Pengurus Barang Pembantu di SMPN, Puskesmas, UPTD	OB	Rp. 200.000
4	Pengurus Barang Pembantu di SDN, Pustu dan Kelurahan	OB	Rp. 150.000

b. Belanja Operasional, Tambahan Penghasilan, Honor Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	a. Bupati	O/T	Rp. 225.000.000
	b. Wakil Bupati	O/T	Rp. 175.000.000

1	2	3	4
2	a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja Pejabat Struktural		
	1. Sekretaris Daerah	O/B	Rp. 15.000.000
	2. Asisten	O/B	Rp. 12.500.000
	3. Staf Ahli Bupati	O/B	Rp. 10.000.000
	4. Kepala Badan/Kepala Dinas/Sekwan/Inspektur	O/B	Rp. 6.500.000
	5. Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Sekretaris BPKAD, Bappeda, Bapenda, Inspektorat	O/B	Rp. 3.500.000
	6. Sekretaris KPU, Camat, Sekretaris Korpri, Irbah Inspektorat, Kabid BPKAD, Kabid Bappeda dan Kabid Bapenda	O/B	Rp. 3.000.000
	7. Sekretaris Badan/Dinas/Instansi Lainnya	O/B	Rp. 2.500.000
	8. Kabid pada Badan/Dinas/Instansi Lainnya, Sekcam	O/B	Rp. 1.500.000
	9. Kasubbag/Kasubid pada BPKAD, Bapenda dan Bappeda, Kepala UPT pada Bapenda dan Kasubbag pada Inspektorat	O/B	Rp. 1.500.000
	10. Kasubbag Protokol pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lurah	O/B	Rp. 1.250.000
	11. Kasubbag pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	O/B	Rp. 1.000.000
	12. Kasi / Kasubbag / Kasubid / Kasi Kecamatan, Kepala UPT Lainnya	O/B	Rp. 750.000
	13. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	O/B	Rp. 750.000
	14. Sekretaris Kelurahan dan Kasubbag TU UPT pada Bapenda	O/B	Rp. 600.000
	15. Kaur Kelurahan/Kasubbag Kecamatan/Korpri	O/B	Rp. 500.000
	b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD		
	1. Auditor / JF-P2UPD Madya	O/B	Rp. 4.000.000
	2. Auditor / JF-P2UPD Muda	O/B	Rp. 3.000.000
	3. Auditor / JF-P2UPD Pertama	O/B	Rp. 2.000.000
3	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	O/B	Rp. 17.500.000
	b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD	O/B	Rp. 15.000.000
	c. Kuasa BUD	O/B	Rp. 8.500.000
	d. Kuasa BUD (Eselon IV)	O/B	Rp. 6.000.000
	e. Staf Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Eselon IV)	O/B	Rp. 4.500.000
	f. Staf Pengelola Keuangan Daerah (ASN)	O/B	Rp. 2.000.000
	g. Staf Pengelola Keuangan Daerah (Non ASN)	O/B	Rp. 1.000.000
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja Non ASN		
	a. Uang piket Pol PP dan Petugas Damkar dan Penanggulangan Bencana (hanya diberikan untuk yang melaksanakan piket)	O/K	Rp. 30.000
	b. Uang makan Pol PP, Damkar Penanggulangan Bencana dan Petugas Pengendalian Operasional	O/B	Rp. 450.000

1	2	3	4
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	a. Penguji Kendaraan Bermotor	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Analisis Kepegawaian	O/B	Rp. 750.000
6	Tunjangan Resiko Tinggi		
	a. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	O/B	Rp. 500.000
	b. Teknisi Kelistrikan	O/B	Rp. 500.000
7	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	O/B	Rp. 4.000.000
	b. Wakil Ketua/ Koordinator	O/B	Rp. 3.500.000
	c. Sekretaris	O/B	Rp. 3.000.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 2.000.000
	e. Koordinator Sekretariat	O/B	Rp. 3.000.000
	f. Anggota Sekretariat	O/B	Rp. 1.000.000
8	Honor Tim Verifikasi Pengelolaan Hibah dan Bansos		
	a. Pengarah/Pembina	O/B	Rp. 750.000
	b. Penasehat/Penanggungjawab	O/B	Rp. 750.000
	c. Ketua	O/B	Rp. 700.000
	d. Wakil Ketua	O/B	Rp. 700.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 600.000
	f. Anggota	O/B	Rp. 500.000
9	Honor Tim Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah		
	a. Koordinator Daerah	O/B	Rp. 2.500.000
	b. Wakil Koordinator	O/B	Rp. 2.000.000
	c. Ketua	O/B	Rp. 2.000.000
	d. Sekretaris	O/B	Rp. 1.750.000
	e. Koordinator Pelaksana	O/B	Rp. 1.500.000
	f. Pelaksana	O/B	Rp. 1.250.000
	g. Staf ASN	O/B	Rp. 1.000.000
	h. Staf Non ASN	O/B	Rp. 300.000
10	Honorarium Tim Penyusunan LKPD, LKPJ dan LKD		
	a. Ketua	O/B	Rp. 2.000.000
	b. Wakil Ketua / Koordinator	O/B	Rp. 1.500.000
	c. Sekretaris	O/B	Rp. 1.250.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 1.000.000
	e. Koordinator Sekretariat	O/B	Rp. 1.250.000
	f. Anggota Sekretariat	O/B	Rp. 750.000
11	Honorarium Tim Review LKPD, LKPJ, LAKIP dan APBD		
	a. Ketua	O/K	Rp. 3.000.000
	b. Wakil Ketua/Koordinator	O/K	Rp. 2.500.000
	c. Sekretaris	O/K	Rp. 2.000.000
	d. Anggota	O/K	Rp. 1.500.000
12	a. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah, Peliputan dan Dokumentasi 1 Kahag Humas dan Protokol	O/B	Rp. 2.000.000

1	2	3	4
	2. Eselon IV pada Bagian Humas dan Protokol	O/B	Rp. 1.500.000
	3. Staf ASN	O/B	Rp. 1.000.000
	4. Staf Non ASN	O/B	Rp. 750.000
	b. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah		
	1. Pembina	O/K	Rp. 400.000
	2. Pengarah	O/K	Rp. 350.000
	3. Ketua	O/K	Rp. 250.000
	4. Anggota	O/K	Rp. 175.000
	c. Honorarium Pengamanan dan Pengawalan Pejabat	O/B	Rp. 1.800.000
13	Honor Tim Penyusunan dan Penjelasan Peraturan Daerah		
	a. Koordinator	/Naskah	Rp. 2.000.000
	b. Sekretaris	/Naskah	Rp. 1.500.000
	c. Anggota	/Naskah	Rp. 1.000.000
	d. Koordinator Sekretariat	/Naskah	Rp. 1.000.000
	e. Anggota Sekretariat	/Naskah	Rp. 750.000
14	Honor Tim Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi		
	a. Koordinator	/Perkara	Rp. 1.500.000
	b. Sekretaris	/Perkara	Rp. 1.250.000
	c. Anggota	/Perkara	Rp. 1.000.000
	d. Staf Sekretariat	/Perkara	Rp. 500.000
15	Honor Tim Asistensi Penyusun dan Penjelasan Peraturan Bupati		
	a. Ketua	/Naskah	Rp. 1.500.000
	b. Sekretaris	/Naskah	Rp. 1.250.000
	c. Anggota	/Naskah	Rp. 1.000.000
	d. Koordinator Sekretariat	/Naskah	Rp. 1.000.000
	e. Staf Sekretariat	/Naskah	Rp. 500.000
16	Honor Tim Kajian Hukum Pemerintah Kabupaten		
	a. Pengarah	/Kajian	Rp. 1.250.000
	b. Ketua	/Kajian	Rp. 1.200.000
	c. Sekretaris	/Kajian	Rp. 1.150.000
	d. Anggota	/Kajian	Rp. 1.100.000
	e. Sekretariat	/Kajian	Rp. 400.000
17	Honor Tim Pengelola JDIH		
	a. Ketua	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 750.000
	c. Pokja Unit Pengembangan Web JDIH	O/B	Rp. 600.000
	d. Pokja Unit Dokumentasi dan Literasi Produk Hukum	O/B	Rp. 600.000
	e. Anggota	O/B	Rp. 500.000
18	Honor Tim Teknis Perumusan Perjanjian Kerja Sama Daerah		
	a. Ketua	/Naskah	Rp. 750.000
	b. Sekretaris	/Naskah	Rp. 650.000
	c. Anggota	/Naskah	Rp. 500.000
	d. Koordinator Sekretariat	/Naskah	Rp. 500.000
	e. Anggota Sekretariat	/Naskah	Rp. 300.000

1	2	3	4
19	Honor Komunitas Intelijen Daerah a. Dewan Pembina 1. Ketua 2. Anggota b. Dewan Pengurus 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota c. Sekretariat Staf Sekretariat	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 200.000
20	a. Honor Tim Saber Pungli 1. Pembina 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Ketua Pokja 5. Anggota Pokja b. Sekretariat Saber Pungli 1. Sekretaris 2. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 700.000 Rp. 650.000 Rp. 600.000 Rp. 550.000 Rp. 500.000 Rp. 550.000 Rp. 500.000
21	a. Honor Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 1. Ketua 2. Wakil 3. Sekretaris 4. Anggota b. Sekretariat Tim 1. Ketua 2. Anggota	O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000
22	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penceramah / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kursus/ Seminar atau Kegiatan Lainnya (Pusat & Provinsi) yang ditetapkan atas dasar SK Bupati a. Eselon I/Pejabat Negara/ Dosen Tamu/yang disetarakan b. Eselon II/Guru Besar/ Dosen Tamu/yang disetarakan c. Eselon III/ Dosen Tamu/yang disetarakan d. Eselon IV kebawah/ Dosen Tamu/yang disetarakan e. Penceramah Agama f. Moderator g. MC dan Do'a	O/J O/J O/J O/J O/K O/materi O/K	Rp. 1.200.000 Rp. 1.000.000 Rp. 800.000 Rp. 600.000 Rp. 5.000.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000
23	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penceramah / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kursus/ Seminar atau Kegiatan Lainnya (Daerah) yang ditetapkan atas dasar SK Pengguna Anggaran a. Pengajar/Narasumber 1. Eselon II/Dosen Tamu/yang disetarakan 2. Eselon III/Dosen Tamu/yang disetarakan 3. Eselon IV kebawah/Dosen Tamu/yang disetarakan	O/JP O/JP O/JP	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000

1	2	3	4
	b. Penceramah Agama c. Moderator d. Instruktur e. MC dan Dirijen f. Biaya Pembuatan Materi g. Penatar/Pengajar 1. Penatar/Pengajar Gol IV 2. Penatar/Pengajar Gol III h. Pelatih Paskibraka	O/K O/Materi O/JP O/K O/Materi O/J O/J O/J	Rp. 2.000.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 250.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 100.000
24	Tim Penilai / Juri / Wasit / Dewan Hakim kegiatan Lomba dan kegiatan sejenisnya a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	 O/J O/J O/J	 Rp. 75.000 Rp. 60.000 Rp. 50.000
25	Insentif Tenaga Keagamaan a. Insentif Marbot b. Rohaniawan c. Guru Ngaji d. PPN/Penghulu	 O/T O/T O/T O/T	 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
26	Honorarium Tenaga Teknis Terlatih a. Tim Pakar Fraksi DPRD Kabupaten Pringsewu b. Tenaga Ahli Komisi DPRD Kabupaten Pringsewu c. Personil Korsik	 O/B O/B O/B	 Rp. 2.275.000 Rp. 2.275.000 Rp. 200.000
27	Honor Tenaga Teknis Lainnya a. Kader Posyandu b. Penjaga Stand c. Petugas P3K	 O/B O/H O/K	 Rp. 35.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
28	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	 O/K O/K O/K	 Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
29	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Pengamanan dan Kamtibmas pada Kecamatan a. Uspika (Camat, Danramil dan Kapolsek) b. Kasi Tibum Kecamatan c. Bahinsa/Bahinkamtibmas	 O/B O/B O/B	 Rp. 1.000.000 Rp. 700.000 Rp. 250.000
30	Honorarium Operator/Admin/Pengelola Advis a. Operator Mesin Porporasi OPD dan SKRD b. Admin RUP, TEPR, LRFK c. Operator Komputer pada Dinas/Badan/Kantor/ Satker (1 Orang) d. Koordinator dan Operator Komputer Gaji (SIM Gaji), Administrasi Pajak (DTH/RTH), Koordinator dan Administrasi/Operator SPD, Administrator SIMDA pada BPKAD, Operator SIMKEDES, Pengelola Advis, Operator Consul PBB/ BPHTB, Admin Omspan	 O/B O/B O/B O/B	 Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 500.000

1	2	3	4
	e. Operator Komputer Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	O/B	Rp. 200.000
	f. Operator Komputer SIMDA-SKPD (Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan 2 Orang)	O/B	Rp. 200.000
31	Honorarium Non ASN / Tenaga Kontrak SK Bupati		
	a. Petugas Kebersihan	O/B	Rp. 1.250.000
	b. Tenaga Pengoperasional alat berat/pengemudi	O/B	Rp. 1.250.000
	c. Penjaga Kantor	O/B	Rp. 1.250.000
	d. Pol-PP	O/B	Rp. 1.250.000
	e. Tenaga Pengoperasional SIAK/E-KTP/Pajak	O/B	Rp. 1.250.000
	f. Pengamanan Kehutanan(PAMHUT)	O/B	Rp. 1.250.000
	g. Satgas Damkar dan Penanggulangan Bencana	O/B	Rp. 1.250.000
	h. Penjaga Pintu Air/Bendungan	O/B	Rp. 1.250.000
32	Honor Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Pringsewu		
	a. Pembina	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Ketua	O/B	Rp. 800.000
	c. Wakil Ketua	O/B	Rp. 750.000
	d. Sekretaris	O/B	Rp. 700.000
	e. Anggota	O/B	Rp. 600.000
	f. Ketua Sekretariat	O/B	Rp. 700.000
	g. Tim Teknis Sekretariat	O/B	Rp. 600.000
	h. Anggota Sekretariat	O/B	Rp. 500.000
33	Honorarium Penunjang Pengembangan / Penelitian / Perencanaan		
	a. Ketua Peneliti	O/B	Rp. 250.000
	b. Koordinator Peneliti	O/B	Rp. 200.000
	c. Sekretariat Peneliti	O/B	Rp. 150.000
	d. Pengolahan Data	Penelitian	Rp. 1.500.000
	e. Petugas Survey	Responden	Rp. 8.000
	f. Petugas Lapangan	O/H	Rp. 50.000
	g. Pembuat Jurnal Kelitbangan	Jurnal	Rp. 200.000
34	Honorarium Tenaga Medis dan Paramedis sebagai Pegawai Tidak Tetap/PTT		
	a. Dokter PTT	O/B	Rp. 2.500.000
	b. Perawat PTT	O/B	Rp. 1.500.000
	c. Bidan PTT	O/B	Rp. 1.500.000
	d. Tenaga Kesehatan Lainnya	O/B	Rp. 1.000.000
	e. Intersip Dokter PTT	O/B	Rp. 500.000
35	Honor Pengelola Obat/Vaksin		
	a. Pengelola Obat Instalasi Farmasi Dinas	O/B	Rp. 250.000
	b. Pengelola Obat Gudang Puskesmas	O/B	Rp. 200.000
	c. Pengelola Vaksin Dinas	O/B	Rp. 100.000
	d. Pengelola Vaksin Puskesmas	O/B	Rp. 75.000
	e. Staf Pengelola Instalasi Farmasi Dinas Non ASN	O/B	Rp. 50.000

1	2	3	4
36	Honorarium Pengawas Pendidikan a. Honorarium Pengawas TK b. Honorarium Pengawas SD c. Honorarium Pengawas Rumpun d. Honorarium Pengawas Pendidikan Agama Islam e. Honorarium Pengawas Pendidikan Masyarakat	O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000
37	Honorarium Non ASN bagi Pendidik dan Non Pendidik a. Honorarium Pendidik b. Honorarium Non - Pendidik	O/B O/B	Rp. 150.000 Rp. 150.000
38	Honor Pendamping, Operator dan Koordinator PKH/BNPT a. Pendamping dan Operator PKH/BNPT b. Tim Koordinasi PKH/BNPT 1. Pengarah 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota c. Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH/BNPT d. Petugas Keamanan Penyaluran Bantuan PKH/BNPT	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 500.000 Rp. 200.000
39	Honor Tagana dan Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i> a. Tagana b. Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i>	O/B O/B	Rp. 200.000 Rp. 200.000
40	Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	O/B O/B	Rp. 300.000 Rp. 250.000
41	Honor Tim Profesi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) a. Pengurus LK3 1. Penanggungjawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota b. Tim Profesi LK3 1. Pekerja Sosial 2. Psikolog 3. Polisi 4. Advokad 5. Tenaga Konselor 6. Tenaga Kesehatan	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000
42	Honor Petugas Pendata PMKS dan PSKS a. Honor Tenaga Input <i>Data Base</i> PMKS 1. Operator <i>Data Base</i> PMKS 2. Koordinator Wilayah Kecamatan 3. Petugas Pendataan PMKS dan PSKS b. Honor Petugas Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	O/B O/B O/B O/K	Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 600.000

1	2	3	4
43	Honor Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, Asistensi Sosial lanjut Usia, KUBE dan Pendamping Program KS (Pusat)		
	a. Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas	O/B	Rp. 200.000
	b. Pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia	O/B	Rp. 200.000
	c. Pendamping KUBE	O/B	Rp. 200.000
	d. Pendamping Program KS	O/B	Rp. 200.000
44	Honor Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)		
	a. Tenaga Ahli (Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan)	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Tenaga dari Instansi Lainnya	O/B	Rp. 1.500.000
45	Honorarium Pengelola Radio Pemerintah Daerah		
	a. Dewan Pengawas		
	1. Ketua	O/B	Rp. 750.000
	2. Wakil Ketua	O/B	Rp. 650.000
	3. Anggota	O/B	Rp. 650.000
	b. Dewan Direksi		
	1. Direktur Utama	O/B	Rp. 600.000
	2. Direktur Teknis	O/B	Rp. 550.000
	3. Direktur Pemberitaan	O/B	Rp. 550.000
	c. Penanggungjawab Penyelenggara Siaran		
	1. Pelaksana Program Siaran	O/B	Rp. 500.000
	2. Pelaksana Pembawa Berita	O/B	Rp. 500.000
	3. Pelaksana Teknis Studio Radio	O/B	Rp. 500.000
	4. Pelaksana Teknis Pemancar Radio	O/B	Rp. 500.000
	5. Pelaksana Teknis Kebersihan	O/B	Rp. 500.000
	6. Pelaksana Teknis Kebersihan	O/B	Rp. 500.000

c. Honorarium Pelaksana Unit Layanan Pengadaan dan LPSE adalah sebagai berikut:

1. Honorarium Pelaksana Unit Layanan Pengadaan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Ketua Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 1.000.000
2	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 750.000
3	Kepala Sub Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 500.000
4	Anggota Sub Unit Layanan Pengadaan	O/B	Rp. 350.000

2. Honorarium Pelaksana LPSE

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Kepala LPSE	O/B	Rp. 1.000.000
2	Sekretaris LPSE	O/B	Rp. 750.000
3	Kepala Sub Unit LPSE	O/B	Rp. 500.000
4	Anggota Sub Unit	O/B	Rp. 350.000

d. Honorarium Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja ULP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	O/B	Rp. 400.000
2	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu s.d 200 jt		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 250.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 225.000
3	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 200 jt s.d 500 jt		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 300.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 275.000
4	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 500 jt s.d 1 M		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 350.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 325.000
5	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu > 1 M s.d 2,5 M		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 450.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 425.000
6	Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu diatas 2,5 M		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 500.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 475.000
7	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu s.d 50 juta		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 200.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 175.000
8	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 50 jt s.d 200 jt		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 300.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 275.000
9	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 200 jt s.d 500 jt		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 400.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 375.000
10	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu > 500 jt s.d 1 M		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 500.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 475.000
11	Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 1 M		
	a. Ketua Pokja ULP	O/P	Rp. 600.000
	b. Anggota	O/P	Rp. 575.000

e. Honorarium Tim/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1	Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 200 jt s.d 500 jt		
	a. Ketua	O/P	Rp. 200.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 175.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 150.000
3	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M		
	a. Ketua	O/P	Rp. 250.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 225.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 200.000
4	Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M		
	a. Ketua	O/P	Rp. 300.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 275.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 250.000
5	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 2,5 M		
	a. Ketua	O/P	Rp. 350.000
	b. Sekretaris	O/P	Rp. 300.000
	c. Anggota	O/P	Rp. 275.000

f. Biaya Paket Pemeriksaan Khusus Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Biaya Paket Pemeriksaan Khusus	Paket	Rp. 3.000.000
	a. Biaya Proses Pengumpulan Data		
	b. Biaya Transportasi Tim ke Lokasi		
	c. Uang Lembur Tim		
	d. Biaya Penyusunan Laporan		

g. Honorarium Panitia dan Sekretariat Seleksi Pengisian dan Mutasi JPT Pratama

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	a. Honorarium Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama		
	1. Ketua	O/K	Rp. 7.000.000
	2. Sekretaris	O/K	Rp. 6.500.000
	3. Anggota	O/K	Rp. 6.000.000
	b. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi JPT Pratama		
	1. Ketua	O/K	Rp. 5.000.000
	2. Sekretaris	O/K	Rp. 4.500.000
	3. Anggota	O/K	Rp. 4.000.000
	c. Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama		
	1. Ketua	O/B	Rp. 3.000.000
	2. Sekretaris	O/B	Rp. 2.500.000
	3. Anggota	O/B	Rp. 2.000.000

h. Honorarium Tim dan Sekretariat Baperjakat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	a. Honorarium Tim Baperjakat		
	1. Ketua	O/B	Rp. 850.000
	2. Sekretaris	O/B	Rp. 750.000
	3. Anggota	O/B	Rp. 650.000
	b. Honorarium Sekretariat Baperjakat		
	1. Ketua	O/B	Rp. 350.000
	2. Sekretaris	O/B	Rp. 300.000
	3. Anggota	O/B	Rp. 200.000

i. Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat		
	a. Honor Mentor Diklat PIM II	O/K	Rp. 500.000
	b. Honor Mentor Diklat PIM III	O/K	Rp. 400.000
	c. Honor Mentor Diklat PIM IV	O/K	Rp. 300.000
	d. Honor Mentor Prajabatan	O/K	Rp. 250.000

1	a. Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV		
	1. <i>Lession Officer</i>	O/K	Rp. 1.000.000
	2. Evaluasi Penyelenggaraan	O/K	Rp. 1.500.000

j. Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Uang Lembur (Lembur Maksimal 30 jam kerja/orang per 1 bulan, maksimal per hari 3 jam)		
	a. Golongan IV	O/J	Rp. 17.000
	b. Golongan III	O/J	Rp. 15.000
	c. Golongan II	O/J	Rp. 12.000
	d. Golongan I	O/J	Rp. 10.000
	e. Non ASN	O/J	Rp. 9.000
2.	Uang Makan Lembur sebesar Rp. 25.000,-/org (diberikan kepada semua golongan secara berturut-turut minimal 3 Jam Lembur dan diberikan maksimal 1 kali per hari)	O/K	Rp. 25.000

II. Biaya Pendidikan dan Beasiswa

a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan diberikan uang saku selama pendidikan:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Diklat PIM :		
	a. Diklat Penjurangan PIM II	O/K	Rp. 10.000.000
	b. Diklat Penjurangan PIM III	O/K	Rp. 5.000.000
	c. Diklat Penjurangan PIM IV	O/K	Rp. 2.000.000

b. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus singkat / pelatihan / Bimtek/ Workshop / Loka Karya dan sejenisnya:		
	a. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang Saku dan Bantuan Transport Peserta	O/H	Rp. 50.000
	b. Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung):		
	1. Biaya Kontribusi	O/H	X
	2. Uang Saku Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas)	O/H	X
	c. Keluar Wilayah Provinsi Lampung:		
	1. Biaya Kontribusi	Org/Agkt	X
	2. Uang Saku dan Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas)	Org/Agkt	X

Ket : X = sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara.

c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar ASN yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat, Pelaksana, Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		
	Dalam Negeri:		
	a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan	O/B	Rp. 900.000
	b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	Org/Angk	Rp. 2.500.000
	Luar Negeri/ <i>Double Degree</i>		
	a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan	Org/Angk	Rp. 2.000.000
	b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	Org/Angk	Rp. 4.000.000
	c. Bantuan Administrasi Keimigrasian	Org/Angk	Rp. 1.500.000
	Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.		
2.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1		
	Dalam Negeri:		
	a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	Org/Angk	Rp. 3.000.000
	Luar Negeri/ <i>Double Degree</i>		
	a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan	Org/Angk	Rp. 2.500.000
	b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	Org/Angk	Rp. 5.000.000
	c. Bantuan Administrasi Keimigrasian	Org/Angk	Rp. 1.500.000
	Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.		

1	2	3	4
3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Dalam Negeri: a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda c. Bantuan biaya pendampingan beasiswa pendidikan bagi dokter umum/dokter gigi untuk melanjutkan ke dokter spesialis Luar Negeri/Double Degree a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda c. Bantuan Administrasi Keimigrasian Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.	 O/B Org/Angk O/B Org/Angk Org/Angk Org/Angk	 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 1.500.000

d. Biaya Pendidikan Tugas Belajar bagi ASN yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana/ Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Dalam Negeri	O/B	Rp. 1.000.000
2.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Luar Negeri	O/B	Rp. 2.500.000

e. Biaya Pendidikan Calon Peserta Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya Kontribusi Peserta	O/B	Rp. 39.500.000

III. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja Telepon	U/B	Disesuaikan dengan tagihan rekening	Seluruh OPD
2.	Belanja Listrik	U/B		
3.	Biaya Air/PAM	U/B		
4.	Belanja Kawat/Faximile/Internet	U/B		

96

1	2	3	4	5
5.	Belanja Alat Tulis Kantor a. Pagu anggaran s/d 100 juta b. Pagu anggaran 100 s/d 300 juta c. Pagu anggaran 300 s/d 500 juta d. Pagu anggaran 500 juta s/d 1 miliar e. Pagu anggaran diatas 1 miliar	/Kegiatan	Rp. 750.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 3.500.000	Untuk kegiatan Diklat, Bimtek, Wokshop, Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya menyesuaikan dengan jumlah peserta dan kebutuhan
6.	Belanja Dokumentasi dan Kegiatan Promosi Pembangunan: a. HUT Kabupaten Pringsewu	Paket	Rp. 30.000.000	Termasuk kendaraan hias
7.	Belanja Makanan dan Minuman a. Makan Minum Rumah Tangga 1) Bupati 2) Wakil Bupati b. Jamuan Makan (Nasi Kotak) c. Jamuan Makan VVIP (Pusat & Prov) d. Jamuan Makan VIP e. Snack Tamu VVIP (Pusat & Prov) f. Snack Tamu VIP g. Buah VVIP (Pusat & Prov) h. Buah VIP i. Snack	U/B U/B O/Kotak O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/Kotak	Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 25.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000 Rp. 40.000 Rp. 12.000	
8.	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Badan/Dinas/Kantor	U/T	Rp. 10.000.000	
9.	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas: a. Bupati b. Wakil Bupati c. Sekretaris Daerah	U/T U/T U/T	Rp. 50.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 20.000.000	
10.	Biaya Pemeliharaan Pendopo	U/T	Rp. 20.000.000	
11.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Gudang/ Tempat a. Gedung/kantor/ruang kerja b. Tempat Penyimpanan/Gudang	U/T U/T	Rp. 30.000.000 Rp. 15.000.000	
12.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Ruangan/RuangRapat/Pertemuan Catatan: Sewa gedung pertemuan sudah termasuk peralatan dan perlengkapan pertemuan (meja, kursi, sound system, dll), biaya kebersihan dan pengamanan.	U/H	Rp. 3.000.000	

78

1	2	3	4	5
	a. Bupati /Wakil Bupati 1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang 2. Biaya Service 3. Biaya Pembelian BBM/ Premix 4. Biaya Pembelian Pelumas 5. Pembelian Accu 6. Pembelian Ban b. Sekretaris Daerah 1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang 2. Biaya Service 3. Biaya Pembelian BBM/Premix 4. Biaya Pembelian Pelumas 5. Pembelian Accu 6. Pembelian Ban c. DPRD (Mobil Ketua/Wakil Ketua) 1. Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang 2. Biaya Service 3. Biaya Pembelian BBM/ Premix 4. Biaya Pembelian Pelumas 5. Pembelian Accu 6. Pembelian Ban	U/T U/T U/B U/B U/T U/T U/T U/T U/B U/B U/T U/T U/T U/T U/B U/B U/T U/T	Rp. 30.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 5.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 9.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 9.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 9.000.000	
16.	Belanja Jasa Kir Kendaraan Dinas/Operasional	U/T	Rp. 250.000	
17.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): a. Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati 1. Kendaraan Dinas Bupati 2. Kendaraan Dinas Wakil Bupati b. Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kendaraan roda 6 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 3 4. Kendaraan roda 2	U/T U/T U/T U/T U/T U/T	Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	
18.	Belanja Sewa Alat Berat a. Belanja Sewa Eskavator b. Belanja Sewa Buldoser	U/J U/J	Rp. 500.000 Rp. 500.000	
19	Biaya Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat	U/T	Rp. 6.000.000	
20.	Belanja Sewa Meja dan Kursi a. Sewa Meja (Penerima Tamu)	U/K	Rp. 60.000	

1	2	3	4	5
	b. Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar) c. Sewa Meja Kursi (Sova Kelas VIP) d. Sewa Sarung Kursi e. Sewa Meja VIP	U/K U/K U/K U/K	Rp. 5.000 Rp. 50.000 Rp. 4.000 Rp. 125.000	
21.	Belanja Sewa Generator a. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Silent</i>) b. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Biasa</i>)	U/H U/H	Rp. 2.500.000 Rp. 1.000.000	
22.	Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung Sewa Tenda	U/K	Rp. 200.000	
23.	Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Sewa Pakaian Adat/ Tradisional (Sudah termasuk Ongkos <i>Make Up</i>)	Set/Kgt	Rp. 400.000	
24.	Belanja Sewa Perlengkapan/Dekorasi a. Sewa Panggung ukuran 12m x 10m Panggung b. Sewa <i>Lighting</i> (Tata Cahaya) <i>Lighting</i> c. Sewa <i>Sound System</i> (Tata Suara) 1. <i>Sound System</i> Kekuatan 5.000 w 2. <i>Sound System</i> Kekuatan 10.000w 3. <i>Sound System</i> Kekuatan 20.000w 4. <i>Sound System</i> Kekuatan 30.000w d. Sewa Karpet Ukuran 6 m x 8 m Karpet e. Sewa Dekorasi Taman Dekorasi Taman	Set/Kgt Set/Kgt Set/Kgt Set/Kgt Set/Kgt M/kgt Set/Kgt	Rp. 7.500.000 Rp. 6.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 20.000 Rp. 3.000.000	
25.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya a. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDI) Bupati, Wakil Bupati, Sekda/DPRD dan ASN 1. Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati 2. Pakaian Dinas DPRD, Sekda 3. Eselon II 4. Eselon III 5. Eselon IV dan Staf 6. Staf Pakaian Pol PP dan Pemadam Kebakaran 7. Pakaian Khusus Protokol	/stel /stel /stel /stel /stel /stel /stel	Rp. 1.750.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000	

1	2	3	4	5
	b. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1. PSH Bupati/Wakil Bupati 2. PSH DPRD, Sekda c. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1. PSL Bupati/Wakil Bupati 2. PSL DPRD, Sekda d. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) PDU Bupati/Wakil Bupati	/stel /stel /stel /stel /stel	Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 3.750.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.750.000	
	e. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1. PSR Bupati, Wakil Bupati 2. PSR DPRD, Sekda f. Belanja Pakaian Adat 1. Bupati/Wakil Bupati 2. DPRD, Sekda	/stel /stel /stel /stel	Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000	
26.	Belanja Pakaian Hari-hari/Khusus (Batik Kegiatan MTQ, HUT Kabupaten, dan HUT Provinsi) a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD b. Anggota DPRD, Sekda c. Asisten dan Eselon II d. Eselon III e. Eselon IV dan Staf	/stel /stel /stel /stel /stel	Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000	Diberlakukan hanya dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut
27.	Honorarium Peserta Kegiatan dan Biaya Transport/konsumsi dan uang saku bagi Anggota Masyarakat, Kelompok Tani, OKP, Ormas dan Siswa yang ditunjuk melaksanakan kegiatan a. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu b. Keluar Wilayah Kabupaten Pringsewu dalam Provinsi Lampung c. Keluar Wilayah Kabupaten Pringsewu Luar Provinsi Lampung	O/H O/H O/H	Rp. 50.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000	

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
 NOMOR